

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang sedang membangun, ingin mencoba untuk dapat membangun bangsa dan negaranya sendiri tanpa memperdulikan bantuan dari negara lain. Tentu ini pernah dicoba, namun ternyata Indonesia sulit untuk terus bertahan ditengah derasnya laju globalisasi yang terus berkembang dengan cepat tanpa mau menghiraukan bangsa yang lain yang masih membangun. Dalam kondisi seperti ini, Indonesia akhirnya terpaksa mengikuti arus tersebut, mencoba untuk membuka diri dengan berhubungan lebih akrab dengan bangsa lain demi menunjang pembangunan bangsanya terutama dari sendi ekonomi nasional.

Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita (Suparmoko, 2002: 5). Menurut Boediono (1999:22), pertumbuhan ekonomi merupakan tingkat pertambahan dari pendapatan nasional. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi merupakan sebagai proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang dan merupakan ukuran keberhasilan pembangunan.

Jadi tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk meningkatkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktivitas. Pembangunan ekonomi dapat memberikan kepada manusia kemampuan yang lebih besar untuk menguasai alam sekitarnya dan mempertinggi tingkat kebebasannya dalam mengadakan suatu tindakan tertentu.

Pemberlakuan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pelimpahan sebagian wewenang pemerintah daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam rangka pembangunan nasional negara Republik Indonesia dan pemberlakuan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diharapkan bisa memotifasi peningkatan kreatifitas dan inisiatif untuk lebih menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah, dan dilaksanakan secara terpadu, serasi, dan terarah agar pembangunan di setiap daerah dapat benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerah.

Kegiatan pembangunan nasional tidak lepas dari peran seluruh Pemerintah Daerah yang telah berhasil memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia di daerah masing-masing. Sebagai upaya memperbesar peran dan kemampuan daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangga. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, pemerintah daerah tingkat satu memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia di daerah itu dan dituntut untuk bisa lebih mandiri.

Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian.

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolak ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, meskipun telah digunakan sebagai indikator pembangunan, pertumbuhan ekonomi masih bersifat umum dan belum mencerminkan kemampuan masyarakat secara individual. Pembangunan daerah diharapkan akan membawa dampak positif pula terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicerminkan dari perubahan PDRB dalam suatu wilayah. Propinsi Lampung yang dikategorikan memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah ternyata memiliki sumber daya alam yang cukup banyak. Laju pertumbuhan ekonomi di Lampung selama kurun waktu lama tahun 1998-2008 selalu mengalami kenaikan, walaupun kenaikan itu tidak terlalu signifikan. Kondisi tersebut dapat dilihat dari Tabel 1.

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Harga Berlaku Provinsi Lampung Tahun 1998-2008 (milyar rupiah).

Tahun	PDRB (Harga Berlaku)
1998	18.481,5
1999	21.624,2
2000	23.200,3
2001	25.693,7
2002	29.039,7
2003	32.339,9

2004	36.195,2
2005	38.858,0
2006	49.118,3
2007	60.926,1
2008	76.489,5

Sumber : Lampung Dalam Angka, Tahun 1998-2008.

Pada Tabel 1 terlihat bahwa kenaikan PDRB atas dasar Harga berlaku periode 1998-2008 tersebut mengalami kenaikan yang cukup baik walaupun bertahap. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Lampung selalu tumbuh dan berkembang ditiap tahunnya.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah provinsi Lampung menurut sumber yang diperoleh dari Bank Indonesia dan Lampung dalam angka provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 1.2 dimana Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Lampung mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan, namun pada periode 2005 PAD Lampung mulai melonjak mencapai Rp.563,710 milyar dan sampai tahun 2008 tercatat PAD Lampung mencapai Rp.945,340 milyar.

Tabel 2. Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Tahun 1998-2008 (milyar rupiah).

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (milyar rupiah)
1998	55,367
1999	59,663
2000	77,941
2001	139,109
2002	242,925
2003	312,763
2004	422,060
2005	563,710
2006	658,125
2007	879,311

2008	945,340
------	---------

Sumber : Lampung Dalam Angka Provinsi Lampung, Tahun 1998-2008

Pendapatan Asli Daerah yang digali oleh pemerintah daerah sudah mengalami peningkatan baik jumlah maupun proporsi pendapatan dari subsidi masih tetap naik. Sesuai tabel 1.3 dapat terlihat bahwa porsi realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2008 yang terbesar diperoleh dari Pajak Daerah yaitu sebesar 945,918 milyar rupiah, sedangkan sisanya diperoleh dari retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang Sah. Ini menunjukkan bahwa penggalan dana oleh pemerintah daerah provinsi melalui sumber daya asli daerah dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Meningkatnya PAD dan penurunan proporsi tingkat subsidi diharapkan dapat menjadi sinyal bagi kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Tabel 3. Target dan Realisasi PAD Provinsi Lampung Menurut Jenis Penerimaan Tahun 2004-2008 (dalam ribu rupiah).

Tahun	Jenis Penerimaan	Target	Realisasi	Persentase Realisasi (%)
	Pajak Daerah	669.510.000	774.613.920	115,70
	Retribusi Daerah	76.307.964	78.187.108	102,46
	Laba BUMD	10.932.195	10.955.126	100,21
	Penerimaan lain-lain	62.423.279	82.161.998	131,62
		Jumlah Total		
2008		819.173.437	945.918.152	115,47
2007		602.552.662	714.576.591	118,59
2006		512.215.692	658.531.380	128,57
2005		346.266.831	536.739.266	162,80
2004		305.117.936	422.059.081	138,33

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah & Lampung dalam angka.

Pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkesinambungan akan lebih sulit dilakukan pemerintah daerah apabila tanpa adanya dukungan dari pihak swasta. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah daerah perlu membuat kebijakan yang mendukung penanaman modal yang saling menguntungkan baik bagi pemerintah daerah, pihak swasta maupun terhadap masyarakat daerah.

Meningkatnya pertumbuhan investasi di Indonesia dimulai dengan ditetapkannya Undang-Undang No.1 / tahun 1967 tentang penanaman modal asing (PMA) dan Undang-Undang No.6 / tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri (PMDN). Yang kemudian dilakukan Revisi

undang-undang yaitu Undang-Undang No.11/tahun 1970 tentang PMA dan Undang-Undang No.12/tahun 1970 tentang PMDN. Dengan diberlakukannya dan diperbaikinya Perundang-undangan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi di Indonesia dari waktu ke waktu yang kemudian menciptakan iklim investasi yang kondusif selama proses pembangunan di Indonesia. Tumbuhnya iklim investasi yang sehat dan kompetitif diharapkan akan memacu perkembangan investasi yang saling menguntungkan dalam pembangunan daerah. Terbatasnya kegiatan investasi juga tercermin dari minimalnya komitmen investasi swasta di Provinsi Lampung. Minimalnya persetujuan investasi ini diperkirakan terpengaruh oleh kondisi perekonomian global yang sedang mengalami resesi. Perkembangan Investasi (PMDN dan PMA) di Propinsi Lampung tahun 1998-2008 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Perkembangan Investasi (PMDN dan PMA) di Provinsi Lampung Tahun 1998-2008.

Tahun	Investasi	
	PMDN (Juta rupiah)	PMA (000 US \$)
1998	296.775,3	72.125
1999	449.884,5	14.875
2000	268.888,1	29.797
2001	206.119,7	91.413
2002	2.785.086	30.031
2003	148.900,0	1.670
2004	618.000,0	280.133,50
2005	1.440.135	63.500
2006	3.763.050	178.282
2007	951.356,4	248.283,63
2008	532.635,9	19.557,75

Sumber : BPPMD provinsi Lampung ,Lampung Dalam Angka. BPS 2008 .

Nilai investasi di Lampung sangat fluktuatif. Seperti yang terlihat pada tabel diatas, kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2006. Dari sejumlah proyek penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang ditanamkan oleh para investor tersebut bernilai 5,4 triliun rupiah. Berdasarkan data Badan Promosi dan Pemilikan Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Lampung dan Laporan Kajian ekonomi regional provinsi lampung, sampai dengan akhir

tahun 2006, investasi yang masuk ke Provinsi Lampung mencapai Rp5,4 triliun yang terdiri dari 14 proyek PMA dan 7 proyek PMDN. Angka investasi yang masuk tersebut melampaui target investasi Lampung yang sebelumnya ditargetkan hanya sebesar Rp1,5 triliun.

Hampir seluruh kegiatan investasi yang masuk ke Lampung merupakan industri pengolahan berbasis pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa Lampung masih menjadi daerah potensial bagi investasi di sektor pertanian.

Penggalan pendapatan daerah, dan peningkatan peran serta investor dalam berinvestasi dalam pembangunan daerah diharapkan menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan daerah. Pemerintah daerah harus melaksanakan pendekatan perencanaan pembangunan daerah dari bawah ke atas (*bottom up*) agar pembangunan yang dilaksanakan daerah merupakan keinginan bersama dan sesuai dengan potensi yang ada agar kesinambungan pembangunan dapat tercapai.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa tingkat investasi dan pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh masing-masing terhadap pertumbuhan ekonomi dalam hal ini di proxy kan dengan PDRB provinsi Lampung. Apabila nilai dari masing-masing variabel meningkat maka peningkatan juga terjadi pada pertumbuhan ekonomi dalam hal ini adalah PDRB. Apabila terjadi penurunan dari variabel-variabel tersebut penurunan juga terjadi terhadap PDRB, dari fenomena tersebut di atas maka perlu adanya suatu penelitian yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi demi kelangsungan pertumbuhan ekonomi di Lampung. Hal ini yang melatarbelakangi penelitian dengan judul “**Analisis Pengaruh Tingkat Investasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung**”.

B. Permasalahan

Dari penjelasan latar belakang atau pendahuluan bahwa terjadinya kenaikan atau pertumbuhan secara bertahap PDRB Lampung pada tiap tahunnya diakibatkan tingkat investasi yang fluktuatif dan tingkat Pendapatan Asli Daerah provinsi Lampung yang mengalami kenaikan terus menerus tiap tahunnya maka dapat dikemukakan masalah yang ingin disampaikan yaitu Seberapa besar pengaruh masing-masing variable tingkat investasi dan pendapatan asli daerah terhadap PDRB Lampung?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh tingkat investasi dan pendapatan asli daerah terhadap PDRB Lampung.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel tingkat investasi dan pendapatan asli daerah terhadap PDRB Lampung.

D. Kerangka Pemikiran

Secara ringkas kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Pemberlakuan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah

pusat dan daerah merupakan titik tolak pemberdayaan pemerintah daerah secara lebih mandiri. Pembangunan daerah dengan sistem otonomi daerah ditujukan demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi regional yang ditunjukkan oleh besarnya PDRB dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dalam persamaan dapat dituliskan :

$$Y = C + I + G + (X-M)$$

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan yaitu pertumbuhan ekonomi (Y) dipengaruhi oleh besarnya komponen tingkat konsumsi rumah tangga(C), tingkat Investasi(I), pengeluaran pemerintah (G) dan selisih ekspor netto (X-M). Tiap komponen tersebut mempunyai pengaruhnya masing-masing terhadap pertumbuhan ekonomi suatu Negara atau daerah. Menurut Keynes, APBN/APBD merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Untuk pengeluaran pemerintah suatu daerah tidak terlepas dari kajian besarnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dalam rancangan APBD itu sendiri terdiri dari 2 sumber pendapatan daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana perimbangan. Namun dalam penelitian ini yang akan di kaji adalah seberapa besar pengaruh komponen tingkat investasi dan pengaruh tingkat pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dengan peningkatan nilai PDRB, dibutuhkan sumber dana maupun sumber daya manusia untuk mencapai hal itu, Propinsi Lampung menggali dana dari investasi yang ada dan menggali potensi daerahnya. Untuk melihat pengaruh tingkat investasi dan

Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan ekonomi (PDRB) maka digunakan analisis regresi berganda.

Investasi pada hakekatnya merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi, investasi dapat dilakukan oleh swasta, pemerintah atau kerjasama antara pemerintah dan swasta. Pendapatan asli daerah merupakan sumber dana yang diperoleh pemerintah daerah dari pemanfaatan dan pengelolaan sumber-sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah. Kedua aspek tersebut diharapkan menjadi pendorong untuk tumbuh dan berkembangnya suatu perekonomian di daerah tersebut. Dengan demikian tingkat investasi, dan Pendapatan asli daerah dapat dijadikan indikator dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi (PDRB).

Kerangka berpikir yang sudah dimodifikasi :

